

Lebak Bulus-Bundaran HI 30 Menit

JAKARTA – Kabar gembira bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Nanti, saat *mass rapid transit* (MRT) dioperasikan maka waktu tempuh dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) hanya 30 menit.

Waktu ini lebih cepat dibandingkan waktu normal saat ini dengan menggunakan moda angkutan umum *existing*. Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, selama ini perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi dari Lebak Bulus ke Bundaran HI mencapai 1-2 jam. "Bahkan, waktu tempuh tersebut ketika jamsibuk dipagi hari bisa dua jam dari Lebak Bulus ke Bundaran HI," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemarin.

Basuki berharap kala MRT ini beroperasi, mobilitas masyarakat dapat meningkat. Hal ini juga memberikan dampak peningkatan dan pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup warga Ibu Kota.

Jika waktu tempuh Lebak Bulus-Bundaran HI hanya 30 menit, dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sekitar 22,5 menit. Artinya, dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52,5 menit. Bundaran HI-Kampung Bandan merupakan tahap kedua pembangunan MRT Jakarta koridor selatan-utara.

Lebih lanjut Basuki mengungkapkan, pihaknya juga tengah menyiapkan regulasi agar biaya transportasi angkutan umum tidak mahal. Jika semua angkutan umum digunakan untuk bepergian, total biaya yang harus dikeluarkan masyarakat setiap bulan hanya berkisar 10-15% dari total upah minimal provinsi (UMP). "Warga cukup menghabiskan biaya untuk kebutuhan transportasi setiap bulan sesuai

dengan standar, yakni 10-15% dari UMP," sebut mantan anggota DPR RI ini.

Jenis moda angkutan umum di Jakarta yang dimaksud tidak hanya MRT, tetapi juga *bus rapid transit* (BRT) yang lebih dikenal dengan bus Transjakarta, bus besar, bus sedang seperti Kopaja, Metromini, angkutan kota (angkot), dan kereta rel listrik (KRL).

Agar pemberlakuan tiket murah tersebut berhasil maka disiasati dengan menerapkan kebijakan *transit oriented development* (TOD) untuk mengelola properti sepanjang jalur MRT dan di bawah tanah pada halte MRT itu sendiri. Pengelolannya dilakukan sendiri oleh badan usaha milik daerah (BUMD) tersendiri.

Hasil dari pengelolaan properti ini nantinya bisa untuk menyubsidi salah satu moda angkutan umum yang beroperasi, baik MRT atau yang lainnya. "Pak Gubernur telah menyiapkan BUMD untuk itu," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Menurut Pengamat Transportasi Universitas Indonesia (UI) Alvinsyah, dari hasil penelitian terakhir, memang biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk kebutuhan transportasi itu berkisar 10-20% dari pendapatan. Artinya, ketika Pemprov DKI Jakarta nantinya akan menentukan tarif untuk MRT maka tidak serta merta harus diambilkan dari 20% UMP.

Harus dihitung juga biaya operasional yang dikeluarkan

dan kepastian jumlah penumpang untuk sekali jalan. Dari dua variabel itu akan didapatkan berapa biaya yang harus dikeluarkan PT MRT Jakarta untuk operasional dan jumlah pendapatan. Lantas, nantinya didapatkan nilai tarif tertentu untuk satu penumpang.

Namun demikian, tarif yang dihitung operator ini belum tentu dapat diberlakukan, melainkan harus ditelaah Pemprov DKI Jakarta. Jika tarif yang diusulkan operator tersebut sesuai dengan kemampuan masyarakat, tentu tidak ada masalah diberlakukan.

Sebaliknya kalau perhitungan tarif tersebut di atas kemampuan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta harus menyubsidi tarif supaya MRT tetap beroperasi secara

konsisten. "Tergantung formulasinya dari Pemprov DKI Jakarta untuk menentukan nilai tarif ini," sebut Alvinsyah.

• ilham safutra